

**POTENSI EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Donal H Simanjuntak¹, Robert Tua Siregar², Marihot Manullang³, Sarintan E Damanik⁴

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena potensi unggulan serta klasifikasi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara belum teridentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pembangunan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sektor - sektor basis / unggulan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di masing - masing kabupaten/kota, serta menentukan tipologi daerah dan prioritas sektor basis guna pengembangan pembangunan kabupaten / kota. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu tahun 2011 - 2016. Data bersumber dari BPS Provinsi, BPS kabupaten/kota. Serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Model analisis yang digunakan yakni Analisis LQ, Shift - Share, Tipologi Klassen serta Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kabupaten/kota mempunyai potensi masing - masing sesuai dengan kondisinya. Sektor Petanian, Sektor pertambangan dan penggalian, sektor Industri pengolahan serta sektor jasa - jasa merupakan sektor basis yang dominan di Provinsi Sumatera Utara karena 3 Kabupatennya mempunyai basis/unggulan di sektor ini; sedangkan sektor lainnya bervariasi khusus sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi hanya dimiliki Kota Medan sekaligus sebagai Kota yang paling banyak memiliki sektor basis sama seperti Kabupaten Asahan (5 Sektor basis). Kota Medan masuk dalam Tipologi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kemudian Kabupaten Asahan yang masuk dalam Tipologi daerah berkembang cepat. Tiga kabupaten lainnya masuk dalam tipologi daerah relative tertinggal. Dari hasil analisis LQ, *Shift-Share*, Tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral dapat ditentukan kabupaten/kota yang menjadi prioritas pengembangan sektor - sektor unggulan yang dimiliki. Kota Medan dan Kabupaten Toba Samosir mempunyai prioritas pertama untuk pengembangan wilayah atas semua sektor basis yang dimilikinya.

Kata Kunci : Potensi Ekonomi, Kabupaten, Kota, Sumatera Utara

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of superior potential and the classification of districts/cities in North Sumatra Province that have not been identified and utilized optimally for development. This study aims to identify and analyze the base / leading sectors that have competitive advantages and specialization in each district / city, as well as determine regional typologies and priority base sectors for the development of district / city development. The data used in this study is secondary data in the period 2011 - 2016. Data is sourced from provincial BPS, district/city BPS. As well as Bappeda of North Sumatra Province. The analysis model used is LQ Analysis, Shift - Share, Klassen Typology and Growth Ratio Model (MRP). The results of this study conclude that districts/cities have their respective potentials according to their conditions. Agriculture sector, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector and services sector are the dominant base sectors in North Sumatra Province because 3 regencies have bases/leaders in this sector; while other sectors vary specifically in the electricity, gas and clean water sectors as well as the transport and communication sector which is only owned by Medan City as well as the City which has the most base sectors the same as Asahan Regency (5 base sectors). Medan City is included in the Typology of fast-developing and fast-growing regions. Then Asahan Regency, which is included in the regional

typology, is developing rapidly. The other three districts are included in the typology of relatively underdeveloped regions. From the results of the analysis of LQ, Shift-Share, regional typology and sectoral growth, it is possible to determine which districts/cities are the priority for the development of the leading sectors owned. Medan City and Toba Samosir Regency have the first priority for regional development for all of their base sectors

Keywords: Economic Potential, District, City, North Sumatra

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di negara - negara yang mayoritas penduduknya muslim pada umumnya terfokus pada pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan peningkatan kualitas dan standar hidup yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Muslim melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari pandangan tersebut. Pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat (mayoritas Muslim). Namun demikian tetap harus memperhatikan minoritas yang sama - sama mempunyai hak dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional juga harus memperhatikan kondisi daerah-daerah diseluruh Indonesia karena pembangunan daerah tidak bisa disamaratakan dengan alasan perbedaan karakteristik, budaya, keadaan sosial dan sebagainya. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan nasional bisa terlihat dari pembangunan daerah-daerah yang ada.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2002). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan - kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Namun begitu harus diperhatikan bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan moral masyarakatnya dari sisi agama akan menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya pembangunan tersebut. Sudah dua belas tahun Indonesia menghadapi perubahan kondisi pembangunan secara keseluruhan. Pemerintahan dan pembangunan diseluruh Indonesia sudah memasuki otonomi daerah yang memiliki hakikat bahwa pengelolaan pembangunan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah serta terjadinya globalisasi kegiatan ekonomi tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup drastis dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah yang selama ini cenderung seragam mulai berubah dan bervariasi. Oleh sebab itu

pembangunan ekonomi daerah tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008).

(Arsyad, 2002) mengatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Jika dilihat dari kemakmuran suatu daerah, maka daerah satu tidak akan sama dengan daerah yang lainnya walaupun dalam satu provinsi. Kaum klasik berpandangan bahwa daerah yang memiliki atau kaya Sumber Daya Alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin SDA (Emilia & Imelia, 2006). Perbedaan SDA tersebut merupakan modal awal dalam pembangunan yang selanjutnya harus terus dikembangkan. Selain mengandalkan SDA yang ada dibutuhkan juga sinergi dengan faktor - faktor lain seperti SDM yang mengelola SDA, teknologi sebagai alat “tools” untuk mengelola SDA. Sehingga akan dihasilkan barang dan jasa yang baik dan berkualitas, yang akhirnya berdampak pada pendapatan daerah tersebut. Seketika terjadi *multiplier effect* dalam kegiatan perekonomian dan perputaran uang akan terjadi.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera, merupakan provinsi terbesar kedua setelah Provinsi Riau. Sumatera Utara mempunyai luas wilayah sebesar 70.787 km², provinsi yang paling besar luas wilayahnya di pulau Sumatera yaitu Riau dengan luas wilayah 87.023 km². Namun demikian dengan luas wilayah yang lebih kecil dari Riau tetapi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu sebesar 14.150.000 jiwa berbeda jauh dengan propinsi Riau dengan luas wilayah yang lebih besar dengan jumlah penduduk sebanyak 6.000.000 jiwa dan hanya sekitar setengah dari penduduk Sumatera Utara, seperti yang terlihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Provinsi se-Sumatera Tahun 2016

No	Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Daerah Istimewa Aceh	58.375	4.970.010
2	Sumatera Utara	70.787	11.890.399
3	Sumatera Barat	42.297	5.150.021
4	Riau	87.023	6.400.429
5	Jambi	53.435	3.250.017
6	Sumatera Selatan	91.592	8.250.007
7	Bengkulu	19.778	2.050.147
8	Lampung	35.376	8.250.108

Sumber data: BPS-Statistik Indonesia 2016

Provinsi Sumatera Utara mempunyai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 571,72 Triliun . Provinsi Sumatera Barat dengan PDRB - nya sebesar Rp. 178,81 Triliun dan Propinsi Riau sebesar Rp. 158,2 Triliun pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 5,1%, pertumbuhan provinsi lainnya di pulau Sumatera seperti Riau sebesar 4,45% dan Sumatera Barat dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,41%. Hal inilah yang harus dilakukan Pemda Sumatera Utara untuk meningkatkan pertumbuhan agar tidak tertinggal dari provinsi lainnya seperti ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2
Perbandingan PDRB dan Laju Pertumbuhan ekonomi
Propinsi se Sumatera tahun 2016

No	Wilayah	PDRB (Triliun Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Daerah Istimewa Aceh	33,07	2,29
2	Sumatera Utara	571,72	5,23
3	Sumatera Barat	178,81	5,41
4	Riau	158,26	4,45
5	Jambi	38,89	5,20
6	Sumatera Selatan	83,77	4,77
7	Bengkulu	13,33	4,99
8	Lampung	63,77	5,07

Sumber: BPS - Statistik Indonesia, 2016

Bencana alam terjadi di salah satu kabupaten di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Karo yang telah berjalan selama 4 tahun. Seiring dengan terjadinya bencana alam di daerah tersebut jelas mempengaruhi Sumatera Utara secara keseluruhan. Ini memiliki dampak yang besar terhadap kegiatan ekonomi di daerah karena bencana alam dapat menimbulkan dampak langsung berupa kematian, kerugian materiil, rusaknya sektor - sektor ekonomi. Hal ini jelas memperparah kondisi ekonomi daerah meskipun saat ini Sumatera Utara berada dalam taraf pemulihan dari adanya bencana alam yang sering melanda.

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota dituntut untuk mandiri mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu indikatornya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan hasil murni yang didapatkan oleh suatu daerah. Semakin besar PAD, maka menunjukkan kemandirian daerah tersebut. Untuk meningkatkan PAD nya yang nanti akan berpengaruh terhadap PDRB, maka pemerintah daerah harus terus menggali potensi ekonomi yang ada. Salah satunya dengan memanfaatkan warisan alam untuk pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan selalu mensyukuri pemberian dari Allah Ta'ala sehingga nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Ta'ala.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat dua puluh lima Kabupaten dan delapan Kota dimana tentunya setiap kabupaten dan kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai keadaan daerahnya masing-masing sehingga akan mempunyai PDRB, tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang berbeda-beda pula seperti yang terlihat dalam Tabel 3. berikut ini .

Tabel 3
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara
Periode 2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010

No	Kabupaten/Kota	PDRB Tahun 2015 (Milyar Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata - rata (%)
1	Mandailing Natal	7 037,24	6,54
2	Tapanuli Selatan	7 540,96	4,41
3	Tapanuli Tengah	5 460,81	5,04
4	Tapanuli Utara	4 646,64	5,12
5	Dairi	4 355,22	4,24
6	Asahan	20 019,06	5,88
7	Simalungun	21 197,54	5,33
8	D a i r i	5 153,96	5,03
9	K a r o	11 326,40	5,18
10	Deli Serdang	55 870,48	7,67

11	Langkat	23 150,80	5,12
12	Humbang Hasundutan	3 284,16	5,30
13	Pakpak Bharat	639,24	5,91
14	Samosir	2 366,56	5,95
15	Serdang Bedagai	15 080,96	5,12
16	Batubara	19 457,83	4,20
17	Padang Lawas Utara	6 230,97	6,12
18	Padang Lawas	5 999,93	6,01
19	Labuhanbatu	18 167,79	5,22
20	Labuhanbatu Selatan	14 548,32	5,33
21	Labuhanbatu Utara	13 420,27	5,40
22	Nias Utara	1 842,56	5,27
23	Nias Barat	970,53	5,12
24	N i a s	1 992,05	5,47
25	Nias Selatan	3 356,63	4,32
26	Sibolga	2 757,70	5,89
27	Tanjungbalai	4 392,45	5,78
28	Pematangsiantar	7 596,87	6,37
29	Tebing Tinggi	3 083,91	5,44
30	M e d a n	117 497,62	6,05
31	B i n j a i	6 230,55	5,83
32	Padangsidempuan	3 276,83	5,02
33	Gunungsitoli	2 565,47	6,11
Provinsi Sumatera Utara		419 649,28	5,23

Sumber Data: BPS - SUMATERA UTARA Dalam Angka, 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2015 terdapat kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata terendah sebesar 4,2 % yaitu Kabupaten Batu Bara dan Dairi. Hal ini memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Sumatera Utara terutama Pemda Kabupaten Batu Bara dan Dairi.

Selain bencana alam yang menjadi salah satu masalah di Provinsi Sumatera Utara, ada beberapa masalah lain yang berhubungan dengan potensi ekonomi itu sendiri. Setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi di masing - masing kabupaten / kota, namun belum diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini penting dan bagian dari identifikasi potensi ekonomi.

Masalah selanjutnya, dari pertumbuhan ekonomi yang ada belum diketahui sektor ekonomi yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif. Sehingga pertumbuhan yang ada hanya terbatas pada angka - angka kuantitatif saja. Untuk itu setelah sektor basis diketahui, dilanjutkan dengan identifikasi sektor - sektor yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif.

Tidak hanya itu, masalah lain yang harus diselesaikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas angka - angka dan memiliki arti penting adalah dengan mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki potensidaya saing kompetitif dan spesialisasi. Ini menjadi penting, dikarenakan potensi yang belum diketahui keunggulannya sulit dikembangkan. Namun jika sudah diketahui sektor mana saja yang memiliki potensi masing - masing, maka pemerintah bisa mengambil sikap dan kebijakan terhadap sektor-sektor tersebut dengan lebih tepat

Masalah yang melanda Provinsi Sumatera Utara berhubungan dengan potensi ekonomi yaitu belum diketahui daerah masing-masing kabupaten/kota yang digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan. Dengan ada otonomi daerah, semua kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri membangun daerahnya. Tapi Provinsi memiliki peran sebagai koordinasi antar kabupaten/kota sehingga Provinsi harus mengetahui daerah mana yang bisa dijadikan contoh untuk memacu pengembangan pembangunan.

Masalah terakhir yang penting yaitu belum adanya prioritas sektor basis dalam pengembangan pembangunan. Sembilan sektor yang dimiliki oleh kabupaten/kota memiliki program dalam kegiatan ekonominya. Namun tidak semua dapat dijalankan serentak. Hal ini terkendala oleh anggaran yang dialokasikan, kemudian RPJMD dan “urgensi” program tersebut. Untuk itu prioritas penentuan sektor basis harus dilaksanakan dengan harapan pemerintah dengan kebijakannya dan keterbatasan anggarannya memprioritaskan sektor-sektor basis.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir di kabupaten/kota yang lain cukup baik, namun masing-masing kabupaten/kota harus lebih meningkatkan PDRB nya. Agar hasil pendapatan daerah berkah untuk rakyat setempat, perlu dihindari kegiatan ekonomi atau sektor-sektor yang haram, bertentangan dengan syariat Islam serta merugikan orang banyak. Pemda harus kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Karena masih banyak potensi yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga kabupaten/kota di Sumatera Utara menemukan dan mengetahui sektor-sektor yang unggul di daerahnya.

Banyaknya provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia yang meyebar dari Sabang sampai Merauke dan beragamnya potensi daerah yang berbeda diperlukan perhatian yang serius dalam upaya pengembangan pembangunan oleh Pemerintah. Tidak setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang sama, untuk itu penelitian dan studi lanjutan secara terus-menerus harus dilakukan agar pembangunan di daerah lebih cepat dan sesuai dengan keadaan daerah tersebut. Pemerintah juga harus menjaga agar potensi-potensi tersebut tidak dikuasai pihak asing dengan sesukanya sehingga akan berdampak merugikan daerah tersebut.

Dari uraian di atas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi daerah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah Sumatera Utara sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era otonomi daerah. Peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *expost facto*, dimana menggunakan data masa lampau yang sudah ada tanpa memberi perlakuan maupun *treatment* khusus pada variabel yang diteliti. Di dalam bukunya (Sugiyono, 2005), mengemukakan *expost facto* adalah : “Suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut”.

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian Kuncoro, dikutip dalam (Kuncoro, 2003). Populasi dari penelitian ini adalah

Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2005) “sampel adalah sebagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan - pertimbangan tertentu dari peneliti. (Sugiyono, 2005) mengungkapkan: “*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Sampel dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara. *Field Research, Library researc.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan dengan metode LQ menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 tidak mengalami perubahan yang berarti. Sektor basis di tiap kabupaten / kota cenderung tetap, tidak banyak sektor yang mengalami perubahan dari sektor bukan basis ke sektor basis demikian sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di kabupaten-kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2011 sampai 2016 tidak banyak mengalami perubahan. Secara lengkap berikut ini dapat dijelaskan hasil analisis LQ untuk masing - masing sektor selama 6 tahun sejak tahun 2011 - 2016.

1. Hasil analisis Shift-Share tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi

Analisis *shift-share* merupakan tehnik yang menggambarkan *performance* (kinerja) sektor - sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja sektor - sektor perekonomian nasional. Dengan demikian dapat ditemukan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu memperoleh kemajuan lebih lambat atau lebih cepat dari kemajuan nasional (Bendavid - Val, 1983), (Hoover, 1984) Lihat (Prasetyo, 1993) dalam (Nudiatulhuda, 2007). Selanjutnya (Arsyad, 1997) dan (Adam, 1994), mengemukakan bahwa analisis shift - share merupakan tehnik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor - sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor - sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis *shift - share* (S-S) tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi menurut sektor setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, terlihat bahwa setiap kabupaten / kota memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan spesialisasi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara bervariasi dan tentunya ditopang oleh sektor spesialis dan sektor kompetitif.

Daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara yang mempunyai kompetitif ditandai dengan K - K positif. Untuk sektor pertanian terdapat tiga kabupaten yang mempunyai keunggulan kompetitif masing-masing di Kabupaten Tapanuli Utara, Pakpak Bharat dan Dairiserta sektor pertambangan dan penggalian terdapat tiga kabupaten yang mempunyai spesialisasi, yaitu Tapanuli Utara, Pakpak Bharat dan Dairi. Sebaliknya ada dua kabupaten/kota bernilai K - K negative artinya tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Kemudian diketahui juga bahwa dari lima kabupaten/kota hanya Kabupaten Asahan yang memiliki keunggulan kompetitif di sektor pertambangan dan penggalian. Keunggulan kompetitif di sektor industri pengolahan dimiliki oleh Kabupaten Tapanuli Utara, Kab. Dairi, dan Kota Medan. Selain itu, keunggulan kompetitif di sektor listrik, gas, dan air bersih

dijumpai di Kabupaten Tapanuli Utara, Dairidan Asahan. Keunggulan kompetitif di sektor bangunan hanya dimiliki oleh Kabupaten Pakpak Bharat. Di sektor perdagangan, hotel dan restoran keunggulan kompetitif dimiliki oleh seluruh kabupaten, kecuali Kota Medan. Kabupaten Asahan dan Kota Medan mempunyai keunggulan kompetitif di sektor pengangkutan dan komunikasi. Kabupaten/kota yang keunggulan kompetitifnya di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dimiliki oleh Kabupaten Tapanuli Utara, Dairidan Asahan. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki keunggulan kompetitif pada sektor jasa-jasa hanya Kabupaten Pakpak Bharat.

Selain itu, kita bisa melihat keunggulan spesialisasi yang dimiliki masing-masing daerah. Spesialisasi dapat dilihat dengan nilai S-S positif. Untuk sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian terdapat tiga kabupaten yang mempunyai spesialisasi untuk dua sektor tersebut, masing masing terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara, Pakpak Bharat, dan Dairi. Sebaliknya ada dua kabupaten bernilai S-S negative artinya tidak memiliki spesialisasi.

Spesialisasi di sektor industri pengolahan dimiliki oleh Kabupaten Tapanuli Utara, Pakpak Bharat dan Asahan. Spesialisasi di sektor listrik, gas, dan air bersih hanya dimiliki oleh Kota Medan. Selanjutnya, spesialisasi di sektor bangunan dijumpai di Kabupaten Pakpak Bharat dan Asahan. Kemudian Kabupaten Asahan dan Kota Medan berspesialisasi di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Medan bertumpu pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Kabupaten yang spesialisasinya di sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dimiliki oleh Kabupaten Asahan dan Kota Medan. Sedangkan kabupaten / kota yang berspesialisasi pada sektor jasa - jasa adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan dan Kota Medan.

Dari keunggulan kompetitif dan spesialisasi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota, ada yang dimiliki keduanya sekaligus. Artinya sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif sekaligus spesialisasi di daerah tersebut. Namun tidak semua seperti itu, hanya beberapa sektor tertentu dan daerah tertentu.

Penentuan Prioritas wilayah untuk pembangunan selain dilihat dari sektor basis yang tercermin pada analisis LQ, keunggulan kompetitif dan tipologi daerah juga diperlukan pertumbuhan persektor. Analisis tersebut selanjutnya dibuat Ranking nilai dengan range untuk masing - masing kategori sehingga dapat ditentukan kabupaten/kota yang potensial untuk dikembangkan dengan sektor basisnya sebagai berikut:

a. Prioritas Sektor Pertanian

Hasil penentuan prioritas sektor basis untuk sektor pertanian. Hasil analisis menunjukkan dari tiga Kabupaten yang mempunyai LQ > 1 untuk sektor pertanian, prioritas pertama kabupaten yang dapat dikembangkan adalah Kabupaten Dairi. Sedangkan prioritas keempat meliputi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Pakpak Bharat

Tabel 4

Prioritas Untuk Sektor Pertanian dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi Daerah dan Pertumbuhan Sektoral Tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota	LQ		PS		S		K		T	Total Skor		PRIO
	N	R	N	R	N	R	N	R	R	N	R	
Tapanuli Utara	1,481	4	3.18	4	139602.1	4	0.003	1	4	17	4	4
Pakpak Bharat	1.329	4	3.40	3	206906.7	4	0.007	1	4	16	4	4
Dairi	2.142	1	3.62	1	616594.3	1	-0.018	4	4	11	1	1

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sumatera Utara (diolah)

Keterangan: N = Nilai T = Tipologi R = Ranking S = Spesialisasi
 K = Kompetitif PRIO = Prioritas Sektor Basis PS = Pertumbuhan Sektoral

b. Prioritas Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 5 merupakan hasil penentuan prioritas sektor basis untuk sektor pertambangan dan penggalian. Dari tiga kabupaten yang memiliki LQ > 1 untuk sektor ini diketahui bahwa Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairimasuk prioritas pertama sedangkan Kabupaten Tapanuli Utara masuk prioritas keempat.

Tabel 5
Prioritas Untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi Daerah dan Pertumbuhan Sektoral Tahun 2011 - 2016

Kabupaten/Kota	LQ		PS		S		K		T	Total Skor		PRIO
	N	R	N	R	N	R	N	R	R	N	R	
Tapanuli Utara	1,398	4	2.04	1	5358.0	4	-0.008	2	4	15	4	4
Pakpak Bharat	1.384	4	1.96	1	9602.5	4	-0.006	1	4	14	1	1
Dairi	2.635	1	0.52	4	34660.7	1	-0.018	4	4	14	1	1

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sumatera Utara (diolah)

Keterangan: N = Nilai T = Tipologi R = Ranking S = Spesialisasi
 K = Kompetitif PRIO = Prioritas Sektor Basis PS= Pertumbuhan Sektoral

c. Prioritas Sektor Industri Pengolahan

Terdapat tiga Kabupaten/Kota yang mempunyai sektor basis atau mempunyai LQ > 1 disektor Industri Pengolahan seperti terlihat dalam Tabel 6 berikut

Tabel 6
Prioritas Untuk Sektor Industri Pengolahan dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral Tahun 2011 – 2016

Kabupaten/Kota	LQ		PS		S		K		T	Total Skor		PRIO
	N	R	N	R	N	R	N	R	R	N	R	
Tapanuli Utara	1,141	4	3.27	1	30505.4	4	0.003	1	4	14	4	4
Pakpak Bharat	1.252	1	0.78	4	122573.0	1	-0.023	4	4	14	4	4
Asahan	1.153	4	2.53	3	121917.5	1	-0.003	2	1	11	1	1

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sumatera Utara (diolah)

Keterangan: N = Nilai T = Tipologi R = Ranking S = Spesialisasi
 K = Kompetitif PRIO = Prioritas Sektor Basis
 PS = Pertumbuhan Sektoral

Tabel diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota yang termasuk dalam prioritas pertama adalah Kabupaten Asahan. Sedangkan Tapanuli Utara dan Kabupaten Pakpak Bharat termasuk prioritas keempat.

d. Prioritas Listrik dan Air Bersih

Lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sektor basis di sektor Listrik, Gas dan Air Bersih hanya Kota Medan. Dengan demikian prioritas pengembangannya pun hanya berada di Kota Medan.

e. Prioritas Sektor Bangunan

Dari lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera utara yang mempunyai sector basis di sector bangunan hanya kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Asahan. Sehingga prioritas pengembangan wilayahnya hanya pada dua daerah tersebut dengan prioritas pertama untuk Kabupaten Pakpak Bharat dan prioritas keempat untuk Kabupaten Asahan seperti dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Prioritas Untuk Sektor Bangunan dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral Tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota	LQ		PS		S		K		T	Total Skor		PRIO
	N	R	N	R	N	R	N	R	R	N	R	
Pakpak Bharat	1.205	1	10.68	1	68741.8	4	0.033	1	4	11	1	1
Asahan	1.166	4	8.14	4	82998.3	1	-0.001	4	1	14	4	4

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sumatera Utara (diolah)

Keterangan: N = Nilai T = Tipologi R = Ranking S = Spesialisasi
 K = Kompetitif PRIO = Prioritas Sektor Basis PS = Pertumbuhan Sektoral

f. Prioritas Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Dari lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai sektor basis di sektor perdagangan, hotel dan restoran hanya Kabupaten Asahan dan Kota Medan. Sehingga prioritas pengembangan wilayahnya hanya pada dua daerah tersebut dengan prioritas pertama untuk Kota Medan dan prioritas keempat untuk Kabupaten Asahan seperti dalam Tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8
Prioritas Untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral Tahun 2011 - 2016

Kabupaten/Kota	LQ		PS		S		K		T	Total Skor		PRIO
	N	R	N	R	N	R	N	R	R	N	R	
Asahan	1.061	4	5.72	1	82998.3	4	0.009	1	4	14	4	4
Medan	1.222	1	4.72	4	220350.4	1	-0.003	4	1	11	1	1

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sumatera Utara (diolah)

Keterangan: N = Nilai T = Tipologi R = Ranking S = Spesialisasi
 K = Kompetitif PRIO = Prioritas Sektor Basis PS = Pertumbuhan Sektoral

Dari tabel diatas terdapat dua Kabupaten termasuk dalam prioritas pertama yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan prioritas kedua adalah Kabupaten Asahan dan prioritas keempat yaitu Kota Medan.

g. Prioritas Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Dari lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki LQ > 1 atau yang mempunyai sektor basis di sektor pengangkutan dan komunikasi hanya Kota Medan. Dengan demikian prioritas pengembangannya pun hanya berada di Kota Medan.

h. Prioritas Sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan

Dari lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai sektor basis di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan hanya Kabupaten Asahan dan Kota Medan.

Sehingga prioritas pengembangan wilayahnya hanya pada dua daerah tersebut dengan prioritas pertama untuk Kota Medan dan prioritas keempat untuk Kabupaten Asahan seperti dalam Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Prioritas Untuk Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral Tahun 2011 - 2016

Kabupaten/Kota	LQ		PS		S		K		T	Total Skor		PRIO
	N	R	N	R	N	R	N	R	R	N	R	
Aashan	1.096	4	5.22	1	50245.1	4	0.005	1	4	14	4	4
Medan	1.473	1	4.76	4	214286.9	1	-0.004	4	1	11	1	1

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB DIY (diolah)

Keterangan: N = Nilai T = Tipologi R = Ranking S = Spesialisasi
 K = Kompetitif PRIO = Prioritas Sektor Basis PS = Pertumbuhan Sektoral

i. Prioritas Sektor Jasa - Jasa

Tabel 10 merupakan hasil penentuan prioritas sektor basis untuk sektor jasa-jasa. Dari tiga kabupaten/kota yang memiliki LQ > 1 untuk sektor ini yang masuk prioritas satu untuk pengembangan wilayah adalah Kabupaten Asahan dan Kota Medan. Sedangkan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi prioritas keempat.

Tabel 10
Prioritas Untuk Sektor Jasa - Jasa dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral Tahun 2011 - 2016

Kabupaten/Kota	LQ		PS		S		K		T	Total Skor		PRIO
	N	R	N	R	N	R	N	R	R	N	R	
Tapanuli Utara	1.040	4	4.02	2	10154.7	4	-0.006	3	4	17	4	4
Asahan	1.030	4	4.18	1	29323.3	4	-0.003	1	2	12	1	1
Medan	1.246	1	3.66	4	203528.8	1	-0.008	4	1	11	1	1

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sumatera Utara (diolah)

Keterangan: N = Nilai T = Tipologi R = Ranking S = Spesialisasi
 K = Kompetitif PRIO = Prioritas Sektor Basis PS = Pertumbuhan Sektoral

Secara keseluruhan hasil analisis untuk penentuan prioritas pengembangan wilayah bagi daerah yang mempunyai sektor basis di Provinsi Sumatera Utara terlihat dalam Tabel 11 berikut:

Tabel 11
Prioritas Pengembangan Pembangunan Sektor Basis di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 - 2016

No	Kabupaten/Kota	Sektor Ekonomi/Prioritas ke								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab. Tapanuli Utara	4	4	4	-	-	-	-	-	4
2	Kab. Pakpak Bharat	4	1	4	-	1	-	-	-	-
3	Kab. Dairi	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Asahan	-	-	1	-	4	4	-	4	1

5	Kota Medan	-	-	-	1	-	1	1	1	1
---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber: Hasil Analisis LQ, Shift-Share, Pertumbuhan Persektor (diolah)

Keterangan : 1= Sektor Pertanian 2= Sektor Pertambangan, Penggalian
 3= Industri Pengolahan 4= Listrik dan Air Bersih
 5= Bangunan 6 = Perdagangan, Hotel, Restoran
 7= Pengangkutan, Komunikasi 8= Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9= Jasa-jasa
 - = Tidak masuk prioritas

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian kecuali pada sektor - sektor yang mempunyai potensi berkembangnya cukup besar memperlihatkan bahwa prioritas pengembangan wilayah sektor basis di Provinsi Sumatera Utara tidak sama untuk tiap kabupaten / kota, meskipun terlihat terdapat dua kabupaten / kota yang termasuk pada prioritas pertama yang perlu dikembangkan, masing - masing yaitu Kota Medan untuk semua sektor basisnya (5 sektor) meliputi Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Sektor Jasa-Jasa serta Kabupaten Dairi (2 Sektor) meliputi Sektor Pertanian serta Sektor Pertambangan dan oenggalian.

Bagi Kota Medan hal ini dimungkinkan karena Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara yang secara tidak langsung menjadi mascot untuk Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten lainnya yang mempunyai prioritas pertama lebih dari satu adalah Kabupaten Pakpak Bharat (2 dari 4 sektor), Kabupaten Asahan (2 dari 5 sektor) tapi adapula kabupaten yang tidak mempunyai prioritas pertama yakni Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam RKPD 2016 sebagaimana diketahui, prioritas pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 adalah meliputi:

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar, Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja.
- 2) Peningkatan Daya saing Daerah Berbasis Keunggulan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan dan Peningkatan Kreativitas Masyarakat, Dukungan Fasilitasi dan Pengembangan Pasar.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan melanjutkan Reformasi Birokrasi melalui Internalisasi Nilai-nilai Budaya Sumatra dan Peningkatan Profesionalisme.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penataan Kawasan dan Peningkatan Sarana Prasarana Ekonomi dan Fisik.

Sejalan dengan RKPD 2016 bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan daya saing daerah berbasis keunggulan ekonomi lokal, maka dengan teridentifikasinya sektor - sektor unggulan disetiap kabupaten / kota akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam mencapai program tersebut. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dikemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor basis yang dominan di Provinsi Sumatera Utara karena terdapat di tiga kabupaten/kota dari lima kabupaten/kota. Sedangkan sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terdapat di dua kabupaten / kota. Untuk sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi hanya dimiliki oleh satu kabupaten/kota. Kabupaten Asahan dan Kota Medan memiliki sektor basis terbanyak dengan lima sektor basis. Sedangkan Kabupaten Dairi memiliki sektor basis paling sedikit yaitu hanya dua sektor.
2. Hasil analisis MRP yang di overlay menunjukkan bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komperatif terhadap sektor ekonominya. Sektor tersebut adalah sektor bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, kemudian sektor bangunan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Asahan begitu juga untuk sektor perdagangan, hotel dan reseteran serta sektor pengangkutan dan komunikasi di Kota Medan.
3. Hasil analisis *Shift-Share* di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil bhwa terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki keunggulan/daya saing kompetitif maupun spesialisasi. Sektor tersebut antara lain:
 - a. Sektor pertanian mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di 3 kabupaten yaitu Tapanuli Utara, Pakpak Bharat dan Asahan;
 - b. Sektor Bangunan mempunyai keunggulan kompetitif dan Spesialisasi di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di Kabupaten asahan;
 - d. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaaan mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di Kabupaten Asahan;
 - e. Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di Kota Medan.
 - f. Tidak semua sektor basis di kabupaten/kota mempunyai spesialisasi
 - g. Demikian sebaliknya tidak semua yang masuk kriteria spesialisasi belum tentu sebagai sektor basis.
4. Berdasarkan Tipologi Klassen, Kota Medan masuk dalam Tipologi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh. Sedangkan Kabupaten Asahan masuk dalam Tipologi Daerah Berkembang Cepat. Tiga kabupaten lainnya yaitu Tapanuli Utara, Pakpak Bharat dan Dairi masuk dalam Tipologi Daerah Relatif Tertinggal.
5. Menentukan Prioritas Pengembangan Wilayah berdasarkan analisis LQ, *Shift - Share*, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral maka dapat ditentukan kabupaten/kota yang menjadi prioritas pengembangan masing-masing sektor. Prioritas pertama untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Dairi; Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Pakpak Bharat dan Dairi; Sektor industri pengolahan di Kabupaten Asahan; Sektor Listrik, gas dan air bersih di Kota Medan; Sektor bangunan di Kabupaten Pakpak Baharat; Sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kota Medan; Sektor pengangkutan dan komunikasi di Kota Medan; Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Kota Medan serta untuk sektor jasa - jasa diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Asahan dan Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. *“Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua)”*. Yogyakarta: BPFE. 2002
- Ayubi, A. A. (2014). Analisis potensi ekonomi kabupaten banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1-15.
- Basuki, Agus Tri. “Analisis Potensi Unggulan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Menopang Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2004-2008” dalam *Unisia Vol XXXII No. 71*, 2009. h. 5-19
- BPS. *“Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara 2010-2015”*. BPS SUMUT, 2011
- BPS. *“Sumatera Utara Dalam Angka”*. BPS SUMUT, 2011
- Diana, M., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Analisis sektor ekonomi unggulan di provinsi maluku utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 400-415.
- Damanik, M. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 142-154
- Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 79-88
- Ibrahim, I. (2018). Analisis potensi sektor ekonomi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (studi empiris pada kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016). *Gorontalo development review*, 1(1), 44-58.
- Kuncoro, M. *“Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi”*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Lestari, D., Nainggolan, P., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Upah Minimum Kabupaten / Kota Terhadap Inflasi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 27 – .
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.334>
- Mangun, N. (2010). Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi Tengah (Doctoral dissertation, UNDIP).
- Napitupulu, R. S., Saragih, J. R., Hutagalung, G., & Situmeang, R. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil Provinsi Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 75-84
- Paiho, S., Wessberg, N., Pippuri-Mäkeläinen, J., Mäki, E., Sokka, L., Parviainen, T., ... & Laurikko, J. (2021). Creating a Circular City—An analysis of potential transportation, energy and food solutions in a case district. *Sustainable Cities and Society*, 64, 102529.
- Pelda, J., Stelter, F., & Holler, S. (2020). Potential of integrating industrial waste heat and solar thermal energy into district heating networks in Germany. *Energy*, 203, 117812.
- Purba, R. T., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 54 – .
<https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.579>
- Ramlawati, S. E., Harahap, R. D., SE, M. A., Daulay, M. T., SE, M., Tarigan, W. J., ... & SE, M. (2022). Pengantar Ekonomi. Cendikia Mulia Mandiri

- Saragih, B. S., Siregar, R. T., Manullang, M., & Matondang, S. (2020). Peranan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagori Nagur Usang Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 1-13
- Saputro, D. R. P., & Daryono Soebagyo, M. E. (2017). Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Diprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Siregar, M. A. N., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit PTPN - IV Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Pembaangunan Wilayah Di Desa Kedai Damar Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Badagei. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 39 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.578>
- Stegnar, G., Staničić, D., Česen, M., Čížman, J., Pestotnik, S., Prestor, J., ... & Merše, S. (2019). A framework for assessing the technical and economic potential of shallow geothermal energy in individual and district heating systems: A case study of Slovenia. *Energy*, 180, 405-420.
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 135-148
- Winarti, V. P., Erliantari, F., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten 2017–2021. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 155-163